

**FILSAFAT ILMU SOSIAL  
PERSPEKTIF PANCASILAISME  
(Refleksi Kritis atas Konsep Filsafat  
Ilmu Ekonomi Pancasila Mubyarto)**

Oleh: Heri Santoso<sup>1</sup>

*Abstract*

*The Economics philosophy of Pancasila was born as criticism of crisis occurred in neoclassical economics in Indonesia. Mubyarto identify the neoclassical economics crisis of historical, sociological, metaphysics, epistemological, and axiological dimension. Mubyarto offers the Economics philosophy of Pancasila as a solution by offering approach which more considering the sociological and historical dimension of Indonesian plurality. The economics philosophical assumptions must be relied on the philosophy and ideology of Pancasila, not based on liberal ideology.*

*Although there are still any pro and contra opinion about the Economics philosophy of Pancasila, we can say that Mubyarto has succeeded to show the data and fact, identify causes of the Indonesian economics crisis, offer a solution for social science crisis in Indonesia by the Economics philosophy of Pancasila. In the other side, Mubyarto's Economics philosophy of Pancasila faces obstacles, such as the lack of adequate response of other economic scientists, and no economics theory that is really constructed appropriates with the Indonesian socio-cultural condition.*

*Keyword: Mubyarto, philosophy, social science, economics, Pancasila*

**A. Pendahuluan**

“Siapapun makin sulit membantah bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia tidak saja dirasakan *mandeg*, tetapi bahkan dikhawatirkan mundur” Kutipan ini merupakan ungkapan keprihatinan dan kekhawatiran Prof. Dr. Mubyarto tentang perkembangan ilmu, khususnya ilmu sosial di Indonesia. Khusus menanggapi perkembangan ilmu ekonomi di Indonesia Mubyarto mengungkapkan kritik dan keprihatinannya sebagai berikut: “Ilmu Ekonomi di Indonesia, seperti halnya di banyak negara berkembang yang lain, juga tidak relevan (*irrelevant*) untuk meningkatkan

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar pada Fakultas Filsafat UGM.

kesejahteraan rakyat atau untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia sejak pertengahan tahun limapuluhan adalah ilmu yang mengajarkan keserakahan perorangan atas nama benda, yang mengajarkan sifat-sifat egoisme (memikirkan diri sendiri) pada setiap orang dan menafikkan asas dan semangat kekeluargaan.”

Keprihatinan Mubyarto ini sesungguhnya sudah disinyalir oleh Arief Budiman dkk., pada tahun 80-an. Arief Budiman (1984: 165-166) menggambarkan krisis ilmu sosial di Indonesia dengan ungkapannya sebagai berikut: “Di samping adanya kenyataan ilmu-ilmu sosial di Indonesia yang dipengaruhi secara kuat oleh teori modernisasi, ilmu sosial di Indonesia juga masih belum memiliki peta bumi teori-teori yang ada. Belum ada usaha untuk mengelompokkan tulisan-tulisan dari ahli-ahli ilmu sosial kita berdasarkan kekhususan teori masing-masing. Ini mungkin disebabkan karena kebanyakan karya-karya ahli ilmu-ilmu sosial kita baru sampai pada taraf komentar-komentar pendek tentang suatu gejala kemasyarakatan, bukan sebuah teori yang utuh, lepas apakah teori itu merupakan teori yang orisinal atau cangkokan. Komentar-komentar tersebut memang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, tetapi seringkali asumsi-asumsi itu tidak dikemukakan secara terbuka. “

Kritik tajam dari Arief Budiman tentang kondisi ilmu sosial di Indonesia ini hingga saat ini kiranya masih relevan. Kiranya perlu dimunculkan keberanian memulai mensistematisasikan pemikiran ilmuwan sosial Indonesia sehingga menjadi teori yang utuh. Dalam semangat inilah penelitian ini dilaksanakan.

Perkembangan ilmu sosial di dunia, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dengan masalah ideologis, sosio-kultural-historis serta filosofi masyarakat pendukungnya. Pada tataran filosofis, pertimbangan nilai dan ideologi masyarakat secara langsung atau tidak langsung harus dipertimbangkan di dalam menganalisis masalah-masalah sosial. Pengabaian terhadap hal itu menyebabkan ilmu sosial menjadi tidak relevan dan ahistoris. Sekalipun banyak perguruan tinggi di Indonesia yang telah mengajarkan ilmu-ilmu sosial, namun diskursus seputar filsafat ilmu sosial di Indonesia masih relatif terbatas, untuk tidak mengatakan langka. Kondisi ini “diperparah” dengan diajarkannya paham-paham filsafat ilmu sosial yang mayoritas berasal dari Barat. Kenyataan ini tentu mengundang keprihatinan kita bersama, mengapa kita tidak menggali unsur-unsur pemikiran filsafat ilmu sosial yang dilahirkan dari ideologi

yang cocok untuk bangsa Indonesia? Dalam konteks ini, Fakultas Filsafat UGM berusaha mengangkat program penelitian seputar pengembangan kearifan lokal dalam diskursus ilmiah, terutama sebagai bahan pembelajaran yang dapat disandingkan dan dibandingkan dengan aliran pemikiran lain yang relatif lebih mapan

Mengingat ilmu sosial memiliki cakupan yang sangat luas, maka dalam penelitian ini dibatasi dengan mengambil kasus salah satu cabang ilmu sosial yang relatif 'bergengsi' di Indonesia yaitu ilmu ekonomi. Pemilihan ilmu ekonomi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain: Pertama, selama ini ilmu ekonomi kadang dianggap sebagai 'ratu'-nya ilmu sosial. Ilmu ekonomi seolah-olah telah menjadi primadona di bandingkan ilmu sosial lain di era pembangunan. Akibatnya entah baik atau buruk, benar atau salah ilmu ekonomi telah memainkan peran penting di Indonesia. Kedua, pada diskusi akhir-akhir ini ada beberapa kritik tajam dan radikal terhadap perkembangan ilmu ekonomi, misalnya dilontarkan oleh Paul Ormerod dengan bukunya yang cukup menghebohkan dengan judul **Matinya Ilmu Ekonomi** (1999), untuk selanjutnya dia mengusulkan perlunya **Menuju Ilmu Ekonomi Baru** (2000). Khusus di Indonesia kritikan keras terhadap arus utama pemikiran ilmu ekonomi Indonesia juga diungkapkan oleh Mubyarto sebagaimana kutipan di atas.

Pertanyaan seputar apakah ada pemikiran Pancasilaisme itu? Kiranya secara faktual dapat disebutkan bahwa memang ada ilmuwan yang dengan sungguh-sungguh menggali dan menawarkan konsep pemikiran yang mencoba mengangkat Pancasila yang dianggap sebagai salah satu unsur pemikiran lokal untuk dapat disandingkan dan dibandingkan dengan teori atau konsep pemikiran lain. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pemikiran filsafat ilmu sosial, khususnya konsep filsafat IEP yang dikembangkan oleh Mubyarto. Tokoh ini dipilih dengan pertimbangan: (1) Ketersediaan pustaka yang cukup memadai, karena pemikiran Mubyarto relatif banyak dan terdokumentasikan dengan baik; (2) Mubyarto sebagai ilmuwan sosial, khususnya ekonom Indonesia, oleh kawan maupun "lawan"-nya diapresiasi sebagai ilmuwan yang tetap konsisten -- bahkan sampai menjelang wafatnya--gigih memperjuangkan gagasan Sistem Ekomi Pancasila (SEP) dan Ilmu Ekonomi Pancasila (IEP).

Pertanyaan besar dan merupakan proyek jangka panjang adalah apakah ada konsep filsafat ilmu sosial perspektif

Pancasilaisme? Jika ada, bagaimana asumsi ontologis, epistemologi, dan aksiologis keilmuannya?

Mengingat cakupan filsafat ilmu sosial perspektif Pancasilaisme sangat luas, maka jawaban atas pertanyaan di atas sementara ditangguhkan terlebih dahulu, khusus untuk tulisan ini akan diangkat kasus refleksi kritis atas konsep filsafat IEP Mubyarto. Pertanyaan yang berusaha dijawab, antara lain: (1) Bagaimana konsep filsafat ilmu sosial perspektif Pancasilaisme, khususnya konsep filsafat IEP Mubyarto. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menggali asumsi-asumsi dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. (2) Apa persamaan dan perbedaan konsep filsafat ilmu sosial perspektif Pancasilaisme, khususnya konsep filsafat IEP Mubyarto, jika dibandingkan dengan landasan filosofi ilmu sosial lainnya? (3) Apa kelemahan dan kelebihan konsep filsafat ilmu sosial perspektif Pancasilaisme khususnya konsep filsafat IEP Mubyarto ini? (4) Setelah menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3 di atas maka akan dilakukan induksi untuk membahas seputar pertanyaan bagaimana konsep filsafat ilmu sosial perspektif Pancasilaisme yang seharusnya dikembangkan?

## **B. Kritik Mubyarto atas Ilmu Ekonomi Arus Utama (Neo-Klasik)**

### **1. Kematian Ilmu Ekonomi Neo-Klasik di Indonesia**

Kritik paling fundamental yang dilontarkan oleh Mubyarto terhadap ilmu ekonomi di Indonesia adalah seputar (1) relevansi dan (2) eksistensi ilmu ekonomi Neo-Klasik yang dianut oleh kebanyakan ekonom Indonesia. Bila kita urai secara filosofis, problem relevansi sesungguhnya berkaitan dengan peran dan fungsi ilmu ekonomi dalam konteks keindonesiaan, sementara eksistensi ilmu ekonomi berkaitan dengan keabsahan ilmu ekonomi untuk tetap dianggap sebagai ilmu bukan mistik atau seni. Masalah pertama lebih berkaitan dengan masalah sosio-historis ilmu ekonomi sementara masalah kedua lebih berkaitan dengan masalah fundamental asumsi filosofis yang melandasi bangunan teoritik ilmu ekonomi. Mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka uraian berikut akan dibagi dua, yaitu pertama-tama menginventarisasi dan mengkristalisasi kritik Mubyarto pada dimensi sosio-historis, dilanjutkan dengan kritik pada dimensi filosofis yang mencakup dimensi metafisik, epistemologis, dan aksiologis.

Sejak awal Mubyarto telah mengingatkan para ekonom Indonesia dengan ungkapannya “Tidakkah sudah tiba saatnya

ekonom Indonesia mulai mawas diri dan mempertanyakan relevansi teori ekonomi Neo-Klasik orthodox sebagai ilmu yang mendasari berbagai kebijakan dan strategi ekonomi?" (Mubyarto, 2004A: 4). Mubyarto berkesimpulan bahwa (1) teori ekonomi Neo-Klasik yang terbentuk di Barat satu abad yang lalu hanya relevan untuk menganalisis sebagian kecil perekonomian kita dan tidak relevan bagi sebagian besar yang lain; dan (2) teori ekonomi Neo-Klasik (Barat) ini telah tidak berkembang sebagai ilmu di negara kita, tetapi lebih berkembang sebagai seni.

Merujuk pada buku **The Death of Economics** karya Paul Ormerod, Mubyarto membenarkan bahwa ilmu ekonomi ortodok telah mati. "Ilmu ekonomi dengan para ekonomnya yang gemar membuat ramalan, meskipun hampir selalu ramalan-ramalan yang dibuat meleset, tetap saja ilmu ekonomi yang sama diajarkan kepada siswa dan mahasiswa kita tanpa ada yang berani menunjuk berbagai kekurangan. Ilmu ekonomi kapitalis-liberal dari Barat ini harus dianggap sedang mengalami krisis di Indonesia." (Mubyarto, 2004B: 18)

Ciri khas dari kritik-kritik terhadap ilmu ekonomi adalah kecenderungan ilmu ekonomi yang suka "menjajah" (kolonial), dan arogan, yaitu merasa paling hebat dan paling "eksak" di antara ilmu-ilmu sosial, padahal berdasar pengalaman banyak sekali ramalan ekonom yang meleset (Mubyarto & Awan Santosa, 2004: 3).

"Krisis ekonomi" di Indonesia yang oleh Mubyarto sesungguhnya bukan "krisis ekonomi" tetapi "krisis ilmu ekonomi". Mubyarto mengungkapkan pentingnya pengkajian ulang teori dan ilmu ekonomi konvensional, dengan ungkapannya: "Kami berpendapat bahwa sebenarnya Indonesia dewasa ini tidak mengalami "krisis-ekonomi", tetapi menghadapi "krisis ilmu ekonomi". Artinya kita tidak mungkin keluar dari krisis yang kita hadapi jika tidak bersedia mengkaji ulang seluruh teori ekonomi dan ilmu ekonomi konvensional Barat" (Mubyarto, 2004C:16).

## **2. Kritik atas Dimensi Sosiohistoris Ilmu Ekonomi Neo-Klasik**

### **a) Dimensi Sosiologis Ilmu Ekonomi Neo-Klasik**

Ditinjau dari dimensi sosiologis ilmu, Mubyarto menunjukkan bahwa secara sosiologis, ilmu ekonomi yang dipelajari dan diajarkan di Indonesia pada Fakultas-Fakultas Ekonomi bersumber dari ajaran ekonomi Neo-Klasik yang tidak selalu cocok bagi Indonesia karena lembaga dan budaya bangsa diabaikan (Mubyarto,

2002: 78). Secara sosiologis ilmu, Mubyarto mensinyalir bahwa para ekonom kurang mau dan mampu bekerjasama secara akademis dengan ilmuwan sosial lain seperti sosiolog, antropolog, politikus dan etikus. Akibat dari kondisi sosiologis ini, contoh yang paling mencolok terjadi di Indonesia adalah ketika terjadi krisis moneter dan perbankan di Indonesia, ternyata para ekonom kurang mampu menyelesaikan krisis tersebut. Dalam beberapa hal yang lain Mubyarto menunjukkan bahwa ilmu ekonomi Neo-Klasik kurang relevan untuk menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia.

### **b) Dimensi Historis Ilmu Ekonomi Neo-Klasik**

Sebagaimana pakar ilmu sosial lain, Mubyarto juga menunjukkan adanya krisis dalam ilmu sosial. Mubyarto secara spesifik menunjukkan bahwa ilmu ekonomi yang dianggap sebagai ratunya ilmu sosial juga mengalami krisis. Di antara penyebab krisis itu adalah ilmu ekonomi yang dikembangkan di Indonesia cenderung bersifat *a-historis*, artinya kurang memperhatikan aspek sejarah, akibatnya kurang relevan dan bahkan menjadi *mandeg*. Mubyarto menunjukkan, antara lain : pertama, bahwa ilmu ekonomi yang diajarkan dari Barat, tidak sepenuhnya berangkat dari pemahaman yang benar tentang perkembangan sejarah ilmu ekonomi tersebut di Barat. Beliau dalam beberapa tulisannya menunjukkan bahwa pemikiran Adam Smith (Bapak Ilmu Ekonomi Modern) di Indonesia diajarkan tidak sepenuhnya, melainkan hanya separuh saja dan tidak lengkap). Berdasarkan penelusuran sejarah pemikiran ilmu ekonomi terutama dari kajian atas pemikiran tokoh-tokoh utama ilmu ekonomi seperti J.S. Mill, Alfred Marshall, J.M. Keynes, G.K. Myrdal, dan J.K. Galbraith (Mubyarto, 2004A: 5), menurut Mubyarto dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat lahirnya tahun 1776, ilmu ekonomi itu bernama ilmu ekonomi politik (*political economy*), bukan *economics*. *Political economy* adalah suatu ilmu kemasyarakatan modern yang membahas hubungan antara proses-proses politik dan ekonomi. Mubyarto ingin menegaskan bahwa ilmu ekonomi menurut sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari ilmu sosial lain.

Kedua, Mubyarto juga mengkritik bahwa ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia kurang memperhatikan fakta sejarah Indonesia. Misalnya pemikiran para tokoh ekonomi politik Indonesia seperti Soekarno, M.Hatta, dan Sumitro Djojohadikusumo jarang diajarkan dalam konteks ilmu ekonomi Indonesia. Padahal sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tersebut telah

mengajarkan ilmu ekonomi yang relatif lebih relevan bagi bangsa Indonesia, yaitu ekonomi yang berpihak pada rakyat.

### **3. Kritik atas Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Neo-Klasik**

#### **a) Dimensi Metafisik Ilmu Ekonomi Neo-Klasik**

Kritik paling fundamental Mubyarto pada dimensi metafisik ilmu adalah kritiknya bahwa ilmu ekonomi Neo-Klasik dibangun di atas pondasi asumsi yang salah. Asumsi yang salah itu di antaranya: Pertama, ilmu ekonomi arus utama berangkat dari asumsi yang salah tentang hakikat manusia, yang hanya menekankan manusia sebagai *homo ekonomikus*, padahal manusia juga *homo socius* dan *homo ethicus*. Kedua, ajaran ekonomi ortodok selalu menyatakan bahwa “kebutuhan manusia tidak terbatas”, sedangkan “alat pemenuhan kebutuhan (rezeki) terbatas” (Mubyarto, 2004B: 23). Mubyarto menunjukkan kesalahan asumsi ini dengan menyatakan bahwa kebutuhan disamakan dengan keinginan, padahal beda, yang benar adalah “keinginan manusia yang tak terbatas”. Yang menjadi masalah di Indonesia bukan keterbatasan alat pemuas, melainkan keterbatasan “daya beli” masyarakat (Mubyarto & Awan Santosa, 2004: 5-7). Kesalahan menganut dalil tersebut berakibat: terjadinya kolonialisme (penjajahan) untuk mencari alat pemuas; kelebihan produksi (*over-production*) di negara maju; rekayasa kebutuhan; dan kampanye globalisasi (pasar bebas) (Mubyarto & Awan Santosa, 2004: 7). Ketiga, asumsi yang menyatakan bahwa fenomena ekonomi yang bisa dianalisis hanyalah yang terjadi di pasar atau tentang komoditi yang dipertukarkan di pasar. Bahkan lebih fatal lagi jika dibuat “model ekonomi” (abstrak-matematis) bahwa pasar hanya mengenal 2 sektor ekonomi saja, yaitu sektor produksi (dilakukan perusahaan) dan sektor konsumsi (dilakukan rumah tangga). Dengan asumsi demikian jelas tidak dikenal adanya pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang bertindak sekaligus sebagai produsen dan sebagai konsumen (Mubyarto, 2004B: 18-19)

Dengan sejumlah kritik fundamental di atas, Mubyarto sesungguhnya telah berhasil menunjukkan bahwa asumsi yang digunakan untuk membangun ilmu ekonomi itu tidak benar, karena tidak riilistik, tidak komprehensif, bertentangan dengan ajaran agama dan menyembunyikan kepentingan ideologis tertentu. Tidak riilistik, karena tidak didasarkan atas data yang benar dari riilitas sosioekonomi kultural masyarakat Indonesia. Ajaran ekonomi rakyat disembunyikan. Rakyat tidak diakui sebagai pelaku ekonomi. Yang diakui hanya perusahaan, pemerintah, rumah tangga

konsumen, dan masyarakat luar negeri. Menurut Mubyarto, ekonomi rakyat (lebih dari 90% pelaku ekonomi Indonesia) justru terbukti mampu bertahan dalam krisis moneter 1997. Tidak komprehensif, artinya hanya menekankan dimensi kemanusiaan tertentu (*homo ekonomikus*) dengan mengabaikan dimensi kemanusiaan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu *homo socius* dan *homo ethicus* (religius). Bertentangan dengan ajaran agama mengingat asumsi dalam ilmu ekonomi di atas sesungguhnya bertentangan dengan konsep agama terkait dengan peran Tuhan dalam hal rezeki dan pengendalian diri atas nafsu pemenuhan keinginan. Menyembunyikan kepentingan ideologis tertentu dalam artian sadar atau tidak sadar ilmu ekonomi yang dikembangkan dari asumsi-asumsi di atas sangat diwarnai oleh paham materialisme dan kapitalisme, yang mengutamakan benda dan kepentingan individu.

#### **b) Dimensi Epistemologis Ilmu Ekonomi Neo-Klasik**

Kritik fundamental yang dilontarkan Mubyarto terkait dengan asumsi epistemologis ilmu antara lain : pertama, ilmu ekonomi tidak dikembangkan sebagai ilmu, tetapi lebih dikembangkan sebagai seni. Artinya ilmu ekonomi di Indonesia tidak dikembangkan dengan memenuhi kaidah teoritik dan metodologi pengembangan ilmu melainkan dikembangkan sesuai selera, gaya dan bakat sang ekonom. Artinya ekonomi dianggap sebagai seni untuk memecahkan masalah ekonomi dan seni mengelola kebijakan ekonomi (Mubyarto, 1997: 36).

Kedua, spesialisasi ilmu ekonomi yang terlalu jauh. Mubyarto (2001: 53) mengkritik salah satu di antara penyebab krisis ilmu ekonomi di Indonesia adalah kecenderungan spesialisasi ilmu ekonomi yang terlalu jauh. Spesialisasi ini berakibat kurangnya kerjasama antar sesama disiplin ilmu ekonomi. Kurangnya kerjasama dengan disiplin ilmu-sosial-humaniora yang lain seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik dan sejarah. Sejak ilmu ekonomi menjadi ilmu yang spesialis dan “dipisahkan” dari induknya yaitu ilmu sosial dan ilmu moral (khususnya oleh Paul Samuelson dan Lionel Robbins), terutama dengan digunakannya matematika (ekonometri), ilmu ini memang terasa “kering”, “tidak riilistis” dan makin “tidak relevan”.

Ketiga, kesalahan teoritik. Artinya teori ekonomi yang banyak diajarkan di Indonesia sesungguhnya hanyalah hasil “karangan” bukan hasil penelitian yang serius. Mubyarto dengan merujuk pandangan Prof. Kenneth Galbrith dari Universitas



Harvard. “Dalam teori ekonomi pembangunan dikatakan bahwa negara-negara berkembang, agar maju ekonominya, membutuhkan modal dan teknologi. Teori ini bukan hasil penelitian serius tetapi “dikarang”, agar Amerika yang kebetulan memiliki modal dan teknologi, dapat “membantu” pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dalam bentuk *foreign aid*. Banyak “teori ekonomi” yang ditulis dalam buku-buku teks ekonomi Barat sebenarnya merupakan “karangan” belaka yang jika dilaksanakan ternyata akan lebih menguntungkan para pemodal/investor dari negara-negara industri maju dan berdampak negatif bagi penduduk terutama penduduk miskin di negara-negara berkembang (Mubyarto, 2004B: 21).

Keempat, kesalahan penentuan masalah utama. Masalah utama yang lebih banyak dipermasalahkan dalam model ekonomi ortodok-konvensional adalah masalah pengangguran. Karena orang/manusia tidak dianggap tidak dapat menggunakan sendiri tenaga kerjanya untuk memproduksi (*self employment*). Ia selalu harus ke pasar menjual tenaganya (*wage employment*). Juga tanah dan modal sebagai faktor-faktor produksi harus “dijual” pemilikinya ke pasar. Dengan perkataan lain buku-buku teks ekonomi konvensional Barat tidak mengenal kerja mandiri, tetapi hanya dikenal kerja upahan (*wage employment*) (Mubyarto, 2004B: 19-20). Yang benar, masalah utama ekonomi Indonesia dewasa ini bukanlah pengangguran tetapi kemiskinan. Artinya mereka yang menganggur tidak selalu miskin (Mubyarto, 2004B: 20). Menurut Mubyarto, masalah pokok ekonomi di Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan.

Kelima, kesalahan penerapan metode. Artinya metode induktif dan deduktif digunakan dalam ilmu ekonomi Neo-Klasik secara kurang proporsional. Ilmu Ekonomi Neo-Klasik yang diajarkan di Indonesia terlalu menekankan pendekatan deduktif, dan digunakan secara kurang tepat. Untuk menjadi pemikir yang ulet sekaligus mampu menerapkannya pada kenyataan empiris, metode deduktif dan induktif harus dipergunakan sekaligus (Mubyarto, 2004A: 23). Kesalahan juga terjadi dalam metode pengajaran ilmu ekonomi, yang menekankan pada metode deduktif (*banking education*). Pengajaran demikian menyebabkan siswa hanya pasif dan ilmu kurang berkembang karena tidak didasarkan atas problematik riil yang dihadapi siswa.

Dengan sejumlah kritik atas asumsi epistemologis di atas, sesungguhnya Mubyarto telah berhasil “menelanjangi” ilmu

ekonomi Neo-Klasik secara radikal, terutama rapuhnya landasan teoritik dan metodiknya.

### c) Dimensi Aksiologis Ilmu Ekonomi Neo-Klasik

Kritik fundamental Mubyarto atas dimensi aksiologis ilmu ekonomi Neo-Klasik antara lain: pertama, kritik atas paham kebebasan nilai dalam ilmu. Salah satu kritik mendasar Mubyarto atas asumsi ilmu ekonomi adalah bahwa ilmu sosial ini telah berkembang sebagai ilmu positive semata, yang digerakkan oleh keyakinan bahwa ilmu ekonomi adalah bebas nilai (*value free*).” (Mubyarto & Awan Santosa, 2004: 13). Paham positivisme ini harus ditolak, karena setiap kenyataan (*das sein*) harus dikaitkan dengan idealitanya (*das sollen*). Tujuan ilmu ekonomi adalah kesejahteraan rakyat (Mubyarto, 2001: 23-28)

Kedua, kritik atas motivasi awal belajar ilmu ekonomi. Melalui kajian sejarah ilmu, Mubyarto menunjukkan bahwa: Ilmu mulai dipelajari bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Motif awal belajar ilmu ekonomi di Indonesia adalah untuk menjadi pegawai pemerintah penjajah, bukan untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut (Mubyarto, 2001: 24). Etik bisnis awal yang dikembangkan lebih mengutamakan pertimbangan keuntungan (*profit*) (Mubyarto, 2001: 25). Tahap terakhir “hilangnya etika bisnis” digantikan dengan paham “ekonomisme” masa Orde Baru (1966-1998), yang mengagungkan pembangunan harta (materi) atau pertumbuhan ekonomi (Mubyarto, 2001: 26)

Ketiga, mempertanyakan manfaat dan relevansi ilmu ekonomi Neo-Klasik. Mubyarto mempertanyakan: “Apakah kita tidak sebaiknya benar-benar “mempertanyakan” relevansi dan manfaat ilmu ekonomi yang diajarkan kepada sarjana-sarjana (maksudnya mahasiswa -pen) ekonomi kita terutama di Fakultas-fakultas Ekonomi (Mubyarto & Awan Santosa, 2004: 2)

Mubyarto berkesimpulan bahwa “Ilmu Ekonomi di Indonesia, seperti halnya di banyak negara berkembang yang lain, juga tidak relevan (*irrelevant*) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia sejak pertengahan tahun limapuluhan adalah ilmu yang mengajarkan keserakahan perorangan atas nama benda, yang mengajarkan sifat-sifat egoisme (memikirkan diri sendiri) pada setiap orang dan menafikkan asas dan semangat kekeluargaan”.

Kritik di atas menunjukkan secara jelas bahwa dalam pandangan Mubyarto, ilmu ekonomi Neo-Klasik sesungguhnya menyembunyikan kepentingan materi dan individu di bawah dengan kedok paham kebebasan nilai, dan pada akhirnya ilmu ekonomi yang dikembangkan justru menjadi tidak relevan untuk menyejahterakan rakyat. "Ilmu ekonomi ortodok konvensional (Neo-Klasik) yang berasal dari Barat harus dianggap "ilmu yang tidak ada manfaatnya, atau tidak semuanya relevan untuk diajarkan di Indonesia". Bahkan seandainya kita tidak merasa perlu mengaitkan ilmu ekonomi dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila (Ekonomi Pancasila), ilmu ekonomi Barat tidak dapat dijadikan alat (*tool*) untuk membantu manusia Indonesia memenuhi kebutuhan sosialnya" (Mubyarto, 2004B: 21-22)

### **C. Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Pancasila Mubyarto**

#### **1. Lahirnya Ilmu Ekonomi Pancasila**

Setelah mengkritik secara radikal ilmu ekonomi Neo-Klasik, Mubyarto menawarkan solusi untuk keluar dari krisis. Mubyarto menawarkan konsep pengembangan ilmu ekonomi "baru", yang diberi nama Ilmu Ekonomi Pancasila (IEP), yaitu ilmu ekonomi pasar yang taat mematuhi "jiwa" kelima asas Pancasila, dan setia pada filsafat Pancasila secara utuh yaitu kekeluargaan dan gotong-royong. Dalam beberapa tulisan Mubyarto menyebut ilmu ini dengan ilmu ekonomi koperasi atau ilmu ekonomi kelembagaan.

Ilmu ekonomi koperasi yang dimaksud berbeda dengan ilmu ekonomi ortodok mengajarkan cara-cara bekerjasama bukan cara-cara bersaing. Ilmu ekonomi yang diajarkan di SMA harus kembali disebut dan diajarkan sebagai Ilmu Ekonomi Koperasi Mubyarto, 2004B: 22). Mubyarto mengajak para ekonom untuk berusaha keras mengembangkan ajaran ilmu ekonomi baru yang lebih riilistis dan lebih relevan bagi kehidupan nyata bangsa Indonesia (*real economic life*), bukan ilmu ekonomi abstrak yang berpusat pada model homo ekonomikus dan dapat dipakai untuk menyusun resep-resep pengobatan yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sudah menjadi sangat kompleks.

Ilmu Ekonomi harus diajarkan bukan sebagai ilmu ekonomi konvensional Neo-Klasik, tetapi ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) yang menekankan pada kerjasama antar manusia dan tindakan bersama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mereka hadapi (Mubyarto, 2002: 79).

## **2. Mendefinisikan Ulang Ilmu Ekonomi**

Sebelum memaparkan tentang IEP, Mubyarto mengajak kita untuk meninjau kembali definisi ilmu ekonomi yang selama ini banyak diajarkan di Indonesia.

Definisi ilmu ekonomi dari Alfred Marshall bahwa “ilmu ekonomi adalah kajian tentang manusia dalam kehidupannya sehari-hari; ia mempelajari bagian-bagian tindakan-tindakan individu dan tindakan bersama yang terkait paling erat dengan pencapaian dan pemanfaatan kebutuhan-kebutuhan materiil bagi kesejahteraannya” (Marshall, 1890: 1, dalam Mubyarto, 2004B: 16-17) Mubyarto berpendapat bahwa berdasarkan Pancasila, kebutuhan tidak semata-mata kebutuhan materiil, melainkan juga kebutuhan sosial dan etik yang keduanya tidak dapat diabaikan (Mubyarto, 2004B: 17). Implikasi dari pendefinisian ulang ilmu ekonomi ini, menuntut konsekuensi logis, bahwa ilmu ekonomi harus mau belajar dan bekerja sama dengan ilmu sosial lain untuk memahami kebutuhan sosial dan etik.

## **3. Membangun Ilmu Ekonomi yang Membumi**

Mubyarto mengingatkan para ahli ekonomi Indonesia bahwa Ilmu ekonomi yang selama ini diajarkan kepada para siswa dan mahasiswa adalah ilmu yang “diimpor”, bukan hasil pengembangan bangsa sendiri (Mubyarto, 2002: 55). “Kita seyogyanya paham akan latar belakang perkembangan ilmu-ilmu sosial humaniora yang demikian ini, dan harus mampu secara inovatif menemukan cara-cara kita sendiri untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa kita”.

Ilmu ekonomi yang membumi di sini dapat diartikan secara sosio-historis dan filosofis bahwa ilmu ekonomi yang dibangun haruslah berangkat dari problematik riil masyarakat dan sejarah Indonesia, serta dibangun atas dasar keyakinan ideologi bangsa Indonesia.

Ilmu ekonomi Pancasila (IEP) yang digagas Mubyarto menekankan bahwa ilmu ekonomi tidak boleh melupakan sejarah, baik sejarah ilmu ekonomi itu sendiri maupun sejarah bangsa Indonesia sebagai tempat pengembangan ilmu ekonomi di negeri ini. Mubyarto menunjukkan bahwa teori dan ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia sebagian besar berasal dari Barat, maka harus dipahami dalam konteks pemikiran Barat yang utuh, dan dicari yang relevan untuk Indonesia. Pemikiran seorang tokoh harus dipahami dalam konteks jamannya, bukan diajarkan begitu saja tanpa

konteks.

Ilmu ekonomi Pancasila juga mengajarkan pentingnya fakta sejarah Indonesia. Mubyarto menunjukkan bahwa para founding fathers Indonesia belajar dan mengajarkan ilmu ekonomi sebagai sarana perjuangan melawan penjajahan, pada perkembangan berikutnya dikembangkan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Indonesia. Artinya, ilmu ekonomi menjadi relevan manakala dimaksudkan menjawab persoalan riil masyarakat.

Secara sosiologis, Mubyarto mengingatkan kembali bahwa pendidikan ilmu ekonomi yang semakin spesialis harus dikembalikan pada kedudukannya semula yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-politik dan kultural bangsa ini. Sehingga ekonom Pancasila harus mau bekerjasama dengan ilmu dan disiplin lain untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa ini. Pendekatan inter, antar dan multi disipliner, bahkan non disipliner (tidak lagi berbasis disiplin tertentu) dimungkinkan untuk mengatasi problem-problem kemasyarakatan Indonesia. Jika hal ini dilakukan, maka Mubyarto berharap ilmu ekonomi menjadi semakin membumi, tidak lagi melangit.

#### **4. Dimensi Metafisik, Epistemologis, dan Aksiologis IEP**

##### **a) Dimensi Metafisik**

Manusia dalam ilmu ekonomi Indonesia baru bukan saja *homo ekonomikus*, tetapi harus lebih menonjol sebagai *homo socius* dan *homo ethicus*. Ini berarti kebutuhan manusia riil terbagi 3 yaitu kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan moral. Mubyarto juga mengingatkan bahwa realitas sosial Indonesia itu sangat khas dan kompleks, sehingga tidak dimungkinkan hanya menggunakan satu pendekatan saja untuk menyelesaikan riilitas yang kompleks demikian, maka pendekatan inter, multi, dan trans disiplin sangat diperlukan.

##### **b) Dimensi Epistemologis**

Dari berbagai tulisannya terlihat bahwa Mubyarto, selain menerima rasio dan empiri sebagai sumber pengetahuan, tetapi dalam beberapa hal menunjukkan bahwa keduanya perlu dilengkapi dengan kitab suci (wahyu) dan hati nurani (Mubyarto & Awan Santosa, 2004: 13).

Sebagai konsekuensi logis atas asumsi metafisik di atas, maka Mubyarto menyarankan bahwa spesialisasi ilmu ekonomi harus diimbangi dengan kesediaan untuk bekerjasama dengan ilmu

sosial humaniora lain. Ekonom Pancasila harus mau bekerjasama dengan politikus, sosiolog, dan etikus.

Pada tataran metodologis, Mubyarto mengingatkan bahwa masalah pokok ilmu ekonomi Pancasila adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, bukan masalah pengangguran. Permasalahan demikian dapat didekati dengan menggunakan pendekatan metode induktif dan deduktif secara proporsional. Metode induktif digunakan untuk mengembangkan ilmu terapan untuk memecahkan masalah ekonomi masyarakat. Metode deduktif digunakan untuk menyusun model yang dapat diberlakukan dalam waktu yang relatif lama dan dalam berbagai situasi dan kondisi masyarakat (Mubyarto, 1997: 29-30)

### **c) Dimensi Aksiologis**

Perbedaan mencolok IEP dengan ilmu ekonomi lain adalah penolakan paham kebebasan nilai dalam ilmu ekonomi. IEP dibangun atas dasar asumsi bahwa ilmu ekonomi ini memang sarat dengan nilai (Mubyarto, 2004: 15), yaitu ideologi dan filosofi bangsa Indonesia (Pancasila) yang berarti ilmu ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan (demokrasi) dan keadilan.

Berdasarkan asumsi nilai tersebut, tujuan ilmu ekonomi menjadi jelas yaitu dalam rangka kesejahteraan rakyat (Mubyarto, 2001: 23-28). Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan yang harus diabdikan untuk kepentingan kemanusiaan (Mubyarto, 2004A: 22). IEP mengajarkan: (1) paham “kolektif (*tuna satak bathi sanak*)” untuk mengendalikan pengutamaan paham kepentingan individual; (2) paham “pengendalian diri” untuk mengatasi paham “kebutuhan tak terbatas; (3) Paham “Pemberian rezeki tanpa batas (oleh Tuhan – pen) kepada manusia” untuk mengatasi paham alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas (Mubyarto, 2004C: 20)

### **D. Penutup**

Sekalipun pandangan Mubyarto mengundang pro dan kontra, namun harus diakui ada beberapa keberhasilan yang patut diapresiasi, yaitu: (1) Mubyarto berhasil menunjukkan data dan fakta tentang krisis ilmu ekonomi Indonesia, sekaligus mengidentifikasi sebab munculnya krisis ilmu ekonomi Indonesia. (2) Mubyarto telah berusaha menawarkan solusi keluar dari krisis ilmu sosial di Indonesia dengan menawarkan Ilmu Ekonomi Pancasila (IEP). (3)

Di samping keberhasilan tersebut, gagasan Mubyarto ini juga menghadapi beberapa kendala terutama, gagasannya tersebut belum mendapat sambutan yang memadai dari kolega ilmuwan ekonomi lain. Ada banyak kemungkinan mengapa hal ini terjadi. Di antara kemungkinan itu antara lain: pertama, karena gagasan Mubyarto mungkin dianggap belum meyakinkan baik secara teoritis maupun praksis, karena Mubyarto belum mampu menunjukkan bangunan teoritik dan praktek ilmu ekonomi Pancasila yang dianggap berhasil. Kemungkinan kedua, para ekonom masih didominasi pemikiran Neo-Klasik, sehingga perbedaan paradigma ini menyebabkan para ekonom kesulitan memahami apa yang digagas oleh Mubyarto.

IEP lahir sebagai kritik atas krisis yang terjadi dalam ilmu ekonomi Neo-Klasik di Indonesia. Mubyarto mengidentifikasi adanya krisis ilmu ekonomi Neo-Klasik dari dimensi historis, sosiologis, metafisik, epistemologis, dan aksiologis ilmu. Mubyarto menawarkan IEP sebagai solusi atas krisis Ilmu Ekonomi Neo-Klasik dengan menawarkan pendekatan yang lebih mempertimbangkan dimensi historis dan sosiologis masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat Barat. Asumsi-asumsi filosofis ilmu ekonomi harus didasarkan pada ideologi dan filsafat Pancasila, bukan berdasarkan paham liberal.

Asumsi-asumsi Filosofis IEP (1) Dimensi metafisik IEP berangkat dari asumsi bahwa manusia bukan semata-mata sebagai *homo economicus* tetapi juga *homo socius* dan *homo moralis*. (2) Dimensi epistemologis IEP berangkat dari asumsi bahwa ilmu ekonomi memiliki keterbatasan, maka perlu kerjasama dengan disiplin ilmu sosial-humaniora lainnya. Secara metodologis, IEP harus menggunakan metode deduktif dan induktif secara proporsional. (3) Dimensi aksiologis berangkat dari asumsi bahwa ilmu ekonomi itu tidak bebas nilai, justru sarat nilai dan dikembangkan demi kesejahteraan rakyat.

Harus diakui bahwa Mubyarto telah berhasil menunjukkan data dan fakta, mengidentifikasi penyebab krisis ilmu ekonomi Indonesia sekaligus menawarkan solusi keluar dari krisis ilmu sosial di Indonesia dengan menawarkan Ilmu Ekonomi Pancasila (IEP).

IEP yang digagas oleh Mubyarto menghadapi kendala, antara lain kurangnya sambutan yang memadai dari kolega ilmuwan ekonomi lain, dan belum terbangunnya teori ilmu ekonomi yang benar-benar relevan dengan kondisi sosial budaya Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam IEP.

### **E. Daftar Pustaka**

- Budiman, Arief, 1984, "Ilmu Sosial di Indonesia, Perlunya Pendekatan Struktural", dalam Priyono, A.E., dan Saleh A. O., (penyunting), **Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga**, PLP2M, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1997, **Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto**, Aditya Media, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, **Amandemen Konstitusi: Pergulatan Pakar Ekonomi**, Aditya Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat & Peranan Ilmu-ilmu Sosial**, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004A, **Belajar Ilmu Ekonomi**, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004B, **Neoliberalisme & Krisis Ilmu Ekonomi**, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004C, **Teori Ekonomi dan Kemiskinan**, PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto & Awan Santosa, 2004, **Pendidikan Ekonomi Alternatif di Sekolah-Sekolah Lanjutan**, Aditya Media bekerjasama dengan Pustep UGM, Yogyakarta.
- Ormerod, Paul, 1999, **Matinya Ilmu Ekonomi**, disadur oleh Parakitri T. Simbolon, cet. Keempat, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, **Menuju Ilmu Ekonomi Baru**, disadur oleh Parakitri T. Simbolon, cet. Kedua, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.